

ABSTRAK

RELASI BIROKRASI APARATUR KELURAHAN DAN KARANG TARUNA DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN KEPEMUDAAN DI KELURAHAN TEGAL PARANG JAKARTA SELATAN

Oleh

AURA HAFIZ FABRIZIO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan antara aparatur Kelurahan Tegal Parang dan Karang Taruna dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan serta menganalisis relasi birokrasi yang terbentuk dalam pengembangan kegiatan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara aparatur kelurahan dan Karang Taruna terjalin melalui koordinasi, pembagian peran, serta dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan. Relasi birokrasi yang terbentuk mencerminkan prinsip birokrasi Max Weber yang meliputi pembagian kerja, hierarki kewenangan, aturan formal, dan rasionalitas. Relasi tersebut mendukung peningkatan partisipasi pemuda, penguatan kapasitas organisasi, dan keberlanjutan kegiatan. Namun, pelaksanaan birokrasi yang terlalu prosedural masih berpotensi membatasi ruang inisiatif Karang Taruna. Oleh karena itu, diperlukan hubungan yang lebih partisipatif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan kegiatan kepemudaan secara optimal.

Kata kunci: relasi birokrasi, Aparatur Kelurahan, Karang Taruna, kegiatan kepemudaan.

ABSTRACT

RELASI BIROKRASI APARATUR KELURAHAN DAN KARANG TARUNA DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN KEPEMUDAAN DI KELURAHAN TEGAL PARANG JAKARTA SELATAN

By

Aura Hafiz Fabrizio

This study aims to identify the relationship between the Tegal Parang Village administration and Karang Taruna in implementing youth activities and to analyze the bureaucratic relations established in developing such activities. The research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the relationship between village officials and Karang Taruna is built through coordination, role distribution, and resource support in organizing youth activities. The bureaucratic relationship reflects Max Weber's principles of bureaucracy, including division of labor, hierarchical authority, formal rules, and rationality. This relationship contributes to increased youth participation, strengthened organizational capacity, and program sustainability. However, highly procedural bureaucratic practices may limit the initiative of Karang Taruna. Therefore, a more participatory and collaborative relationship is needed to support the effective development of youth activities.

Keywords: bureaucratic relations, Village Officials, Karang Taruna, youth activities.